

PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH BANDAR LAMPUNG DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH

Moody Rizqy Syailendra, Kearen Elvira Naftali,
Angel Olivia, Aryanti Agripina Winata

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:
Kearen Elvira Naftali

Abstract.

Government oversight and accountability in managing local budgets is still an important thing that must be considered. The principle of accountability is a condition in which government administration can be accounted for before the public both administratively and politically. Accountability itself is the control of a public organization to become a basis for providing explanations to parties both internally and externally. This study aims to analyze mechanisms related to supervision and accountability of the Bandar Lampung City government in managing the budget. This research method uses descriptive qualitative methods, with data collection techniques. The problem in this study, namely the way of supervision and accountability of the Bandar Lampung City government is less than satisfactory. Budgets are often made smaller than the income earned, most users of financial statements do not understand and interpret regional budget reports. However, the level of financial effectiveness in the Bandar Lampung City area is very effective. While the financial condition of the Bandar Lampung City government is still not ideal, this can be seen from the contribution of the Regional Revenue and Expenditure Budget. The Bandar Lampung City Government has a desire to be able to present transparent and accountable accountability.

Keywords: Oversight and accountability, local budget, financial report, Transparent, Administrative

PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran daerah menjadi salah satu aspek terpenting dalam bagian pemerintahan, yang dimana berimplikasikan langsung terhadap pembangunan dan juga pada kesejahteraan masyarakat. Setiap pemerintah daerah memiliki suatu kewenangan dalam mengelola anggaran yang sesuai pada kebutuhan dan prioritas lokal. Namun, dalam pengelolaan anggaran yang efektif diperlukan pengawasan yang ketat serta akuntabilitas juga yang sangat tinggi untuk memastikan dana publik digunakan secara efisien dan transparan.¹

¹ Mardiasmo, “Akuntansi Sektor Publik”. (Yogyakarta, Andi, 2018), hal 22.

Pelaksanaan anggaran memiliki pengertian sebagai seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran daerah, termasuk analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tersebut.² Tujuan pelaksanaan anggaran daerah sendiri adalah untuk memastikan akuntabilitas dengan mempertanggungjawabkan susunan tingkat keuangan kepada lembaga yang bersangkutan dan sah, mencukupi semua kewajiban keuangan dengan menata anggaran agar mampu melunasi ikatan keuangan, mencegah adanya kecurangan dengan memberikan urusan keuangan kepada orang yang jujur dan profesional dan mencapai hasil dan daya guna dengan melaksanakan program kerja dengan biaya yang serendah-rendahnya untuk hasil yang maksimal, serta melakukan pemantauan yang rutin oleh manajer keuangan daerah atau aparat pemeriksaan.³

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan anggaran daerah adalah minimnya pengawasan dari pemerintah atau lembaga yang berwenang, serta adanya kecenderungan untuk membuat peluang yang bersifat menguntungkan untuk kepentingan pribadi.⁴ Tidak sedikit dari pemerintah daerah yang masih mengalami kesulitan dalam menerapkan sistem pengawasan yang memadai. Dampaknya seringkali menimbulkan potensi terjadinya penyimpangan di bagian pemerintahan, seperti penyimpangan anggaran, korupsi, dan kebocoran dana publik. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah perlu diperbaiki lagi dengan penguatan sistem pengawasan agar dapat mendeteksi dan mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai dalam pemerintahan.⁵ Untuk pemerintah daerah, penilaian kinerja pengawasan anggaran daerah menjadi sorotan banyak pihak terlebih dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan pemerintah daerah menjadi lebih luas demi mengatur urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat seperti dalam UU Nomor

² Dewita Sabrina, "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung". *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 2, No. 6 Tahun 2018, hal 574.

³ Rosmiaty Tarmizi dkk, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum dan Setelah Memperoleh Opini WTP". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 2 Tahun 2014, hal 93.

⁴ Muhammad Daffa Sumbing dan Yenni Agustina, "Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Politik Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi". *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, Vol 4, No. 4 Tahun 2023, hal 3259.

⁵ Rosana Puspita, "Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 12, No. 1 Tahun 2020, hal. 45-58.

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004.⁶

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang bersumber pada pengesahannya yang berasal dari masyarakat.⁷ Pemerintah daerah telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk dapat melakukan kinerja yang baik, dan pelayanan yang efektif serta menyentuh pada masyarakat. Pengukuran pada kinerja pemerintah juga mendapatkan perhatian yang sangat serius karena berkaitan dengan tanggung jawab alokasi anggaran daerah. Agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik, maka kualitas pada kinerja pemerintah harus terus ditingkatkan. Salah satu yang dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintah adalah akuntabilitas pengelolaan keuangannya. Akuntabilitas pengelolaan keuangan memiliki pengaruh yang baik dan juga signifikan terhadap cara kerja pemerintah daerah.

Akuntabilitas pemerintah dalam bagian pengelolaan anggaran daerah juga sering menjadi isu yang krusial. Masyarakat sendiri berhak untuk mengetahui bagaimana dana publik tersebut dapat dikelola dan digunakan. Terutama banyaknya berita pengkorupsian dana di sistem pemerintahan Indonesia, membuat masyarakat semakin khawatir terkait dana yang dimana dana tersebut dikelola untuk masyarakat, namun justru digunakan untuk kepentingan perseorangan. Dalam hal ini, laporan terkait keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh publik menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tanpa adanya akuntabilitas yang jelas ini, masyarakat menjadi sulit untuk menilai kinerja dari pemerintah daerah.⁸

Dalam meningkatkan upaya pengawasan dan akuntabilitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung, beberapa daerah salah satunya Kota Bandar Lampung telah mengimplementasikan sistem teknologi informasinya dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, penggunaan aplikasi dan perangkat lunak akuntansi yang terintegrasi diharapkan juga dapat memudahkan pengawasan serta laporan keuangan. Namun, dalam penerapan teknologi juga memerlukan adanya

⁶ Meita Sekar Sari dkk, "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan". *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Akuntansi*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2021, hal 2.

⁷ Muhammad Nasrul Amali dan Eko Darmawan Suwandi, "Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 3, No. 6 Tahun 2021, Hal. 1125-1126.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003*.

pelatihan dan juga dukungan yang memadai agar dapat digunakan secara efektif.⁹

Disamping itu, juga perlu partisipasi masyarakat Kota Bandar Lampung dalam pengawasan anggaran agar dapat meningkat. Masyarakat yang terlibat aktif dalam proses pengawasan dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam mencegah terjadinya penyimpangan serta mendorong transparansi. Oleh karena itu, penting sekali untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi-organisasi non-pemerintah dan akademisi, dalam proses pengawasan anggaran daerah.¹⁰

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, diketahui bahwa daerah yang memiliki sistem pengawasan yang baik cenderung memiliki kinerja anggaran yang lebih baik, dibandingkan dengan pengawasan yang kurang. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang baik, ketat dan akuntabilitas yang jelas dapat berkontribusi dengan lancar pada penggunaan anggaran yang lebih efektif dan juga efisien. Agar hal tersebut tercapai, diperlukannya penerapan prinsip-prinsip *Good governance*. Salah satu prinsip diantaranya adalah transparansi, yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang terbuka bagi masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah agar mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*).¹¹

Di wilayah Indonesia, pajak menjadi suatu sumber pendapatan. Pajak-pajak ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu pajak pemerintah pusat dan pajak daerah. Dalam bagian otonomi daerah, setiap daerah memiliki hak dan kewajiban tersendiri untuk mengatur dan mengurus sendiri mengenai urusan pemerintah yang berguna untuk meningkatkan efisiensi serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan terhadap masyarakat. Provinsi Lampung sendiri merupakan salah satu daerah dengan otonom yang menempatkan pajak daerah sebagai porsi terbesar dalam perolehan PAD. Kontribusi pada pajak daerah mendominasi bahwa lebih dari 70% Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.¹²

Sistem pemerintah sering terjadi kelemahan maupun pada ketidakpatuhan pada peraturan undang-undang. Pokok pada kelemahan itu diketahui oleh APD

⁹ Nurul Hidayah, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Anggaran Daerah". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 2 Tahun 2019, hal. 115.

¹⁰ OECD, "*Budgeting in indonesia: A Review of Public Financial Management*". (Paris, OECD Publishing, 2021).

¹¹ Toni Nurhadianto dan Nur Khamisah, "Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung". *Jurnal TECHNOBIZ*, Vol. 3, No.5 Tahun 2019, hal 26.

¹² Syaqa Putri dan Dani Sugiri, "Menilik Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan PBB-P2 untuk Peningkatan PAD dalam Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus Kota Bandar Lampung". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 10, No. 2 Tahun 2021, hal 142.

yang tidak didasarkan pada perkiraan yang terukur, bahkan sering kali tidak sesuai dengan realitanya. Adanya realisasi belanja daerah yang tidak sesuai dengan peruntukannya dana tersebut sebesar Rp 57,67 miliar, terdapat juga utang belanja daerah yang tidak sesuai dengan anggaran belanja sebesar Rp 736,93 miliar. Kelemahan tersebut dipengaruhi akibat faktor sumber daya manusia dalam Pemerintah Daerah. Anggaran dana yang seharusnya tidak melonjak, menjadi melonjak akibat adanya pengeluaran anggaran daerah yang tidak seharusnya dikeluarkan. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi serta kewenangan dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia inilah yang akan menjadi penentu dalam suatu organisasi untuk menilai apakah organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak.¹³

Dalam konteks globalnya, banyak sekali negara yang telah menerapkan berbagai model dari pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, salah satunya adalah negara Skandinavia. Negara tersebut dikenal sebagai negara dengan sistem pengawasan yang transparan dan partisipatif, sehingga hal ini dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah di Indonesia agar menjadi lebih baik lagi. Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat mempelajari praktik terbaik dari negara lain. Sebenarnya Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah melakukan beberapa usaha untuk menekan target pendapatan asli daerah. Terdapat beberapa prosedur peningkatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yakni penanganan regulasi mengenai standarisasi pelayanan dalam bentuk penyusunan POS, pelayanan perpajakan, dan lain sebagainya.¹⁴ Namun, sayangnya sejumlah prosedur tersebut pada kenyataannya masih belum membawa pengaruh untuk peningkatan pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung.

Sementara itu, terdapat peraturan undang-undang yang mendukung pengawasan dan akuntabilitas yang dimana peraturan tersebut sangat penting. Undang-Undang Keuangan Negara dan peraturan daerah yang terkait harus dirancang untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Sebuah penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran dalam pengelolaan anggaran juga menjadi salah satu langkah yang penting untuk mencegah terjadinya korupsi.

¹³ Shella Lavenia Fitri dan Iskandar Ali Alam, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020". *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 10 Tahun 2022, hal 2059.

¹⁴ Indra Bulan dkk, "Menimbang Peluang Pendapatan Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung dari Industri Seni Pertunjukan". *Sejarah Artikel*, Vol 9, No. 2 Tahun 2020, hal 182.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan serta teori praktik dalam pengelolaan anggaran daerah di Kota Bandar Lampung, dan bagi seluruh daerah di Indonesia. Dengan memahami dinamika antara pengawasan, akuntabilitas, dan pengelolaan anggaran, diharapkan juga dapat ditemukannya solusi yang tepat dan efektif untuk meningkatkan kinerja pemerintah Kota Bandar Lampung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendalami tentang realitas sosial dalam masyarakat serta fenomena-fenomena yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengawasan dan akuntabilitas pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menerapkan pengawasan pengelolaan anggaran daerah.

HASIL PEMBAHASAN

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan analisis data yang telah diperoleh, terdapat beberapa temuan utama:

Transparansi Terkait dengan Laporan Keuangan Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Keuangan Anggaran

Transparansi dalam laporan keuangan menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerahnya. Masyarakat dapat mengetahui bagaimana penggunaan dana publik dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara pemerintah memberikan transparansi terhadap hal tersebut agar masyarakat daerah tersebut dapat mengakses data-data terkait laporan keuangan yang sedang berjalan atau laporan keuangan yang telah dijalankan selama beberapa periode terakhir. Hal terkait dengan adanya transparansi tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang dimana transparansi diartikan sebagai suatu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.¹⁵

Implementasi Otonomi Daerah Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Anggaran di Kota Bandar Lampung

¹⁵ Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”.

Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggarannya, termasuk Kota Bandar Lampung yang memiliki visi berfokus pada tujuan desentralisasi yaitu dengan terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat Kota Bandar Lampung melalui pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dalam mencapai kesejahteraan yang berkeadilan.¹⁶ Berkaca dalam peristiwa tersebut, otonomi daerah merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan anggaran demi tercapainya suatu kesejahteraan dan keterbukaan keuangan terhadap masyarakat provinsi. Namun, dalam melaksanakan hal tersebut diperlukan peningkatan dan partisipasi publik dan tata kelola yang lebih baik agar tata kelola keuangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Masyarakat Perlu Dilibatkan dalam Proses Pengawasan Anggaran Daerah di Kota Bandar Lampung

Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengawasan tata kelola keuangan daerah. Pasalnya, partisipasi aktif masyarakat dapat membantu memantau alokasi dan penggunaan dana publik, mengurangi potensi penyimpangan, dan mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Sebagai masyarakat yang tinggal di suatu daerah, maka diperlukan andil dan kesadaran serta kepedulian terhadap keuangan daerah agar keuangan tersebut tidak digunakan secara *illegal* maupun menyimpang oleh pihak pemerintah. Justru, dengan menjadi masyarakat yang peduli akan keuangan daerah maka daerah tempat tinggal yang ditinggali diharapkan akan menjadi daerah yang maju dan memiliki sarana serta prasarana yang memadai. Sehingga, uang-uang yang dikeluarkan tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat (masyarakat daerah tersebut) sehingga berguna untuk kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu mengajak dan memberikan pengajaran agar masyarakat sadar akan pentingnya terlibat dalam mengelola keuangan ataupun mengetahui informasi mengenai keuangan daerah.

KESIMPULAN

Pengelolaan anggaran daerah merupakan aspek krusial dalam pemerintahan yang berdampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di Kota Bandar Lampung, meskipun belum terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, isu yang paling utama adalah tantangan dalam pengawasan dan akuntabilitas anggaran daerah Bandar

¹⁶ Nina Toyamah dkk, “Dampak Desentralisasi dan Otonomi Daerah atas Kinerja Pelayanan Publik: Kasus Kota Bandar Lampung”, Provinsi Bandar Lampung (Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2002), hal.7.

Lampung. Minimnya pengawasan menimbulkan adanya potensi penyalahgunaan dana publik yang menciptakan risiko terjadinya penyimpangan, termasuk korupsi.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance*, terutama dalam transparansi dan akuntabilitas, sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam proses pengawasan dan juga menjadi faktor serta kunci utama dalam mencegah praktik yang tidak sesuai dan mendorong transparansi. Sebagai upaya perbaikan, pemerintah wajib menerapkan teknologi informasi dan sistem akuntansi yang terintegrasi agar dapat membantu meningkatkan pengawasan dan untuk meningkatkan pelaporan keuangan. Namun, keberhasilan ini memerlukan dukungan, pelatihan, dan partisipasi yang aktif dari masyarakat.

Pemerintah daerah juga diharapkan dapat belajar dari praktik terbaik negara lain, seperti negara Skandinavia, dalam menerapkan sistem pengawasan yang transparan dan partisipatif. Meskipun Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, hasilnya belum signifikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi tambahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru dan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan mendukung transparansi dan akuntabilitas. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran dalam pengelolaan anggaran juga sangat penting untuk mencegah korupsi.

Dengan memahami dinamika antara pengawasan, akuntabilitas, dan pengelolaan anggaran, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik pengelolaan anggaran daerah di Kota Bandar Lampung dan seluruh Indonesia, serta menemukan solusi efektif untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1).
- Amali, Muhammad Nasrul Dan Eko Darmawan Suwandi. (2021). “Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(6), Hal 1125-1126.
- Aminah, A., Khairudin, K., & Indrayenti, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Berkonsep Value For Money. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 467-480.

- Bolang, J. (2014). “Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik”. *Lex Et Societatis*, 2(9), Hal 36.
- Bulan, Indra Dkk. (2020). “Menimbang Peluang Pendapatan Daerah (Pad) Kota Bandar Lampung Dari Industri Seni Pertunjukan”. *Sejarah Artikel*, 9(2), Hal 182.
- Dina Amin, I. (2013). Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Faadhillah, A. L., & Akbar, B. (2024). Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Fitri, S. L., & Alam, I. A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas
- Fitri, Shella Lavenia Dan Iskandar Ali Alam. (2022). “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020”. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(10), Hal 2059.
- Habiburrahman. (2016). “Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Bandar Lampung”. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), Hal 121.
- Harahap, A. R. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi
- Hidayah, N. (2019). “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Anggaran Daerah”. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, 5(2), Hal 101-115.
- Imani, R. (2016). “*Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Bandar Lampung*”. (Disertasi Sarjana, Universitas Lampung, 2016). Diakses Dari <https://www.neliti.com/publications/471249/>
- Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(10), 2057-2070.
- Israr, Nadira Hilmi Dan Efrizal Syofyan (2022) “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Penerapan *Good Governance* Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. *Jurnal Eksplorasi Dan Akuntansi*, 4(4), Hal 689.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 Bab Xix.
- Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Bandar Lampung*, 10(1), 22-33.
- Manajemen Daerah, Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sibolga. *Jurnal Ipdn*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

- Nurhadio, Toni Dan Nur Khamisah. (2019). "Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung". *Jurnal Technobiz*, 3(5), Hal 26.
- Oecd. (2021). *Budgeting In Indonesia: A Review Of Public Financial Management*. Paris: Oecd Publishing.
- Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Pelayanan Publik: Kasus Kota Probolinggo Dan Kota Bukittinggi. Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Purnomo, B., & Putri, C. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Dan Kinerja Anggaran
- Puspitasari, R. (2020). "Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah". *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), Hal 45-58.
- Putri, Riri Septyaningrum Dkk. (2021). "Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung". *Al-Intaj*, 7(1), Hal 62.
- Putri, Syaqa Dan Dani Sugiri. (2021). "Menilik Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Pbb-P2 Untuk Peningkatan Pad Dalam Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Kota Bandar Lampung". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), Hal 142.
- Sabrina, Dewita. (2018). "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung". *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(6), Hal 574.
- Salsabilla, Rani Velia Dan Iskandar Ali Alam (2023). "Penilaian Akuntabilitas Keuangan Sektor Publik Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung". *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 7(4), Hal 1151
- Sari, Meita Sekar Dkk. (2021). "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan". *Jurnal Akuntansi Dan Teknologi Akuntansi*, 3(1), Hal 2.
- Sugista, R. A. (2017). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam
- Sumbing, Muhammad Daffa Dan Yenni Agustina. (2023). "Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Politik Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi". *Management Studies And Entrepreneurship Journal*, 4(4), Hal 3259.

- Tarmizi, Rosmiaty Dkk. (2014). “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung *Sebelum Dan Setelah Memperoleh Opini Wtp*”. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 5(2), Hal 93.
- The Smeru Research Institute. (2004). Dampak Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Atas Kinerja
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.